

**KAPITALISASI MODAL DAN KEPENTINGAN ELIT POLITIK**

(Studi Arena Perebutan Pemimpin Lokal Antar Anak Adat Moi di Kabupaten Sorong 2017)

Bustamin Wahid<sup>1</sup>, Mohamad Saleh Refra<sup>2\*</sup>, La Basri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>3</sup>Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

\*Korespondensi: [mohsalehrefrasalehrefra@gmail.com](mailto:mohsalehrefrasalehrefra@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Political dynamics today is very competitive, all aspects are used as references in practical politics. For example, political elites refer to financial capital and social capital for political purposes (interest politics). The political elite in Sorong Regency makes the Moi custom as an access to legitimize sacredly for the sake of the election of local leaders. This article focused on assessing social capital and political elites in the election of local leaders, the scope of this study was in Sorong, and using social and elite capital theory as an analysis. Sorong regency is customary region of Moi tribe, custom becomes central and even big narration in election of local leader in Sorong regency. The hope and customary interests through the Moi customary council are able to fight for the rights and aspirations of Moi's indigenous peoples in determining their aspirations. To continue the aspiration of the community, the Moi custom council must make a decision through custom forum in Maladofok district of Sayosa to determine the readiness of customary man who deserve to be a leader in Sorong regency which in fact is the customary region of Moi.*

**Key words:** *Modal Social, Elite Politics, and Local Leader*

**ABSTRAK**

Dinamika politik saat ini sangat kompetitif, semua aspek dijadikan acuan dalam politik praktis. Misalnya, elit politik mengacu pada modal finansial dan modal sosial untuk tujuan politik (politik kepentingan). Elit politik di Kabupaten Sorong menjadikan adat Moi sebagai akses untuk melegitimasi secara sakral demi pemilihan kepala daerah. Artikel ini difokuskan untuk mengkaji modal sosial dan elit politik dalam pemilihan kepala daerah, ruang lingkup penelitian ini di Sorong, dan menggunakan teori modal sosial dan elit sebagai analisis. Kabupaten Sorong merupakan wilayah adat suku Moi, adat menjadi sentral bahkan narasi besar dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong. Harapan dan kepentingan adat melalui dewan adat Moi mampu memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat adat Moi dalam menentukan aspirasinya. Untuk meneruskan aspirasi masyarakat, dewan adat Moi harus mengambil keputusan melalui forum adat di kecamatan Maladofok Sayosa untuk menentukan kesiapan manusia adat yang layak menjadi pemimpin di Kabupaten Sorong yang notabene merupakan wilayah adat Moi.

**Kata kunci:** *modal sosial, elit politik dan pemimpin lokal*

**PENDAHULUAN**

Dinamika politik di Kabupaten Sorong memberikan kita sebuah fakta bahwa peran modal sosial dalam kepentingan elit politik

(*elite politics*) untuk mencapai pucuk kepemimpinan di daerah sangat menguat. Modal sosial bukan bagian yang menjadi dasar/fundamental untuk kepentingan politik, tetapi realitas politik hari ini penting untuk mendapat dan memiliki relasi dengan modal sosial. Pandangan universal politik saat ini, tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan modal sosial dan modal finansial menjadi arus yang sinergi untuk mendorong kepentingan pembangunan dan salah satunya adalah pembangunan politik. Wajar jika peluang dan peran modal sosial oleh elite politik (*elite politics*) dalam kepentingan besar seorang politisi. Bisa kita lihat pengesahan dan legitimasi dewan adat Malamoi di Maladofok pada tanggal 18-20 November 2015 adalah satu bukti dan keputusan bahwa peranan modal sosial yang besar terutama pada aspek kepercayaan.

Keputusan masyarakat adat yang dilegitimasi oleh dewan adat Malamoi untuk mendukung seorang Jhony Kamuru adalah akumulasi integritas dan pengabdian untuk masyarakat yang kian lama sehingga masyarakat begitu percaya sosok dan figur seorang Jhony Kamuru. Di sisi lain bisa kita lihat temaun yang pasifik *resources* Indonesia bahwa komitmen dan ketaan terhadap norma dan nilai yang menjadi sandaran masyarakat Moi bisa

dilihat bahwa legitimasi adat memiliki angka presentase 22 persen (%) tertinggi, sedangkan indikator Kejujuran (juju) pada angka 15 Persen (%), (sumber: Laporan hasil survei PRI 2016)

Bisa kita merujuk pada beberapa hasil riset tentang peran modal sosial dalam kepentingan elit politik. Riset yang dilakukan oleh Haryanto tentang politik kain timur, hasil riset tersebut kain timur menjadi salah satu instrumen atau adat menjadi basis legitimasi untuk seseorang politikus merebut dan mencapai kekuasaan. Kain timur sebagai satu instrument yang cukup kuat di beberapa kabupaten di kepala burung Papua salah satunya di Kabupeten Sorong. Politik kain timur lah yang menghantarkan Bapak Otto Ihalau menjadi bupati di Kabupeten Sorong Selatan selama dua periode pada hal sosok Pak Otto Ihalau adalah bukan orang asli Papua tetapi pendatang dari Maluku. Hal itu semua karena satu sistem niali atau modal sosial yang diikuti sehingga beliau mendapat kepercayaan oleh masyarakat, (Heryanto, 2015).

Disisi lain bisa kita lihat hasil riset yang di lakukan oleh Yuliana A (2018) tentang (partisipasi masyarakat Moi dalam pendidikan adat kambik), dalam penelitian ini Yuliana mengungkap tentang

pentingnya nilai pendidikan adat kambik yang menegaskan tentang 4 nilai salah satunya tentang sistem kepemimpinan berbasis pada adat orang-orang Moi. Hal ini loyalitas dan berkomitmen dengan adat menjadi hal yang sangat penting dan sakral dalam kekuasaan. Kini kita bisa melihat bahwa peran adat dalam melegitimasi kepentingan elit politik cukup menguat, rekomendasi dewan adat oleh seorang calon kepada daerah (tertentu) menjadi hal yang penting karena adat lah menjadi salah satu alasan untuk masyarakat adat berkeputusan.

Nah maka dari itu peran modal sosial dalam politik oleh elit politik (*elite politics*) saat ini bukan hal baru, kekuatan modal sosial dijadikan simpul politik dan terus bergerak masuk kepada sendi-sendi sosial baik itu masyarakat urban kota dan masyarakat adat Papua. Orang-orang Moi-Papua sebagai orang asli dan pemilik hak ulayat adat di Kabupaten Sorong. Modal sosial menjadi jaringan kelompok sosial dan bermetamorfosa menjadi kekuatan sosial politik, rupanya solidaritas sosial ini bagian dari transformasi politik gaya baru yang mengedepankan persaudaraan atau dalam konteks lain sering disebut dengan relasi sosial/hubungan sosial.

Politik di Kabupaten Sorong, penting dan harus berjalan mesra dengan dewan adat sebagai institusi adat yang memiliki legitimasi. Arena pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Sorong, telah menjadikan kedua figur (elite politik) yang bertarung yakni Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si yang berpasangan dengan Zet Kadakolo, SE.,MM.

Pandangan dibangun bahwa adat menjadi legitimasi kuat seorang kandidat maka nilai adat atau kontek ini penulis menyebutkan sebagai modal sosial sangatlah penting untuk komoditi, alhasil dalam yang terjadi adalah konflik kepentingan yang terjadi antar adak. Bisa dikatakan bahwa peran modal sosial dalam ruang politik lokal sangat penting, tapi di sisi lain bisa menjadi ancaman antar sesama elit politik dan adat itu sendiri.

Sedangkan kita bisa merujuka kepada kepada sistem kepemiluan hanya terdiri dari dua elemen. Pertama, *electoral law* yakni berdasarkan aturan main yang harus ditaati oleh kontestan pemilu. Kedua, *electoral process* yaitu metode atau aturan untuk mentransferkan suara pemilih menjadi kursi dilemabaga perwakilan. Sebab kita tahu bahwa sistem pilkada kita bagian dari pada kemauan dari model demokrasi yang kita kehendaki selama 5

tahun. Yang dalam pendapatnya Guno Tri (2016:1) di era reformasi berdampak kepada diberlakukannya sistem *nilai one man, one vote, one value* pada saat pilkada berlangsung.

Jika demokrasi langsung kita bagian dari pada hak setiap individu dalam pertimbangan rasionalnya untuk menentukan seorang pemimpin, tapi ini bisa berubah karena terjadi intervensi kekuasaan adat yang muarah kepada transaksional demi kepentingan. Hal ini kemudian bisa dibungkus dalam kepentingan adat, nah ini menjadi persoalan besar yang berefek kepada konflik anak adat.

Tentu kita mengakui bahwa dalam demokrasi kita para elite politik bertarung demi merebut “kekuasaan”, dan itu (hanya) bisa dilakukan dengan jalur kontestasi yang diwujudkan dengan pemilu. Di situlah ruang elite untuk terus bersaing dengan jalur dan regulasi yang telah ditetapkan, diharapkan tidak disorder dengan mekanisme yang telah ada. Sehingga substansi dari demokrasi itu sendiri bisa kita jumpai, yakni demokrasi adalah kebebasan yang rapi.

Momentum pemilihan pemimpin lokal (pemilihan Bupati-Wakil Bupati

Kabupaten Sorong), modal sosial betul-betul mengambil peranan yang sangat fundamental. Selain kita bicara modal sosial (*social capital*) dalam konteks *trust* (kepercayaan), norma, dan jaringan (*networking*). Dengan demikian, maka sangat penting modal sosial (*social capital*) dan elite politik dalam pemilihan pemimpin lokal harus dikaji dan teliti dengan formulasi pertanyaan sebagai berikut. (1) Bagaimana peran modal sosial dalam kepentingan elite politik? (2) Apakah modal figure dan patron adat berpengaruh dalam kepentingan elit politik di pemilihan pemimpin lokal?.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sorong Papua Barat. Dengan konten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong 2017 (Pemimpin lokal). Penelitian ini dilakukan sejak November 2017. Pandangan John W. Creswell (2008:19) penelitian ini adalah kualitatif, lebih kepada kajian studi kasus.

Dalam penelitian studi kasus harus kasus yang populer dan unik terjadi di daerah tertentu saja. Dan studi kasus memiliki batasan yang jelas sehingga dalam penelitian tidak membias dan fokus.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian studi kasus, (1) pemilihan kasus, poin ini sangat penting sebab peneliti harus menentukan kasus mana yang harus diambil menjadi obyek penelitian yang relevan, mutakhir dan bisa diselesaikan oleh peneliti dengan jangka waktu direncanakan. (2) pengumpulan data, yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen-dokumen terkait. (3) analisis data, setelah data yang terkait sudah dikumpulkan maka peneliti mengagregasi, membendaharakan/ mengorganisir dan mengklasifikasi data dalam satu himpulan data yang berhubungan dengan focus penelitian. (4) penulisan laporan, setelah mengumpulkan data dan mengorganisir data maka selanjutnya adalah penulisan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modal Sosial dan Kepentingan Elit Politik Moi

Dinamika dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong 2017 sangat terasa aroma figur anak adat. Anak adat menjadi ujung tombak dari pada isu dan strategi politik, demi mendapat legitimasi dari dewan adat di Maladofik untuk mendukung salah satu kandidat. Rupanya

dalam pemilihan pemimpin lokal ini norma, jaringan dan kepercayaan yang merupakan bagian dari kajian modal sosial (*social capital*) sanga kuat dalam memberi andil, selain kekuatan dan kepercayaan yang dibangun oleh seorang figur itu sendiri.

Keputusan strategis dari dewan adat Moi di Maladofok, adalah salah satu simbol sakral atas legitimasi adat yang memutuskan Jhony Kamur sebagai bupati Kabupaten Sorong. Adat menjadi sentral dalam kepentingan elit politik menuju otoritas kekuasaannya. Masyarakat adat (Dewan adat) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, menjadi patron sosial di kalangan masyarakat Moi.

Setelah keputusan Masyarakat yang diwakili oleh majelis dewan adat Moi pada tanggal 18-20 November 2015, merupakan keputusan kolektif seluruh masyarakat yang menyepakati bahwa Dr. Jhony Kamur, sebagai bupati Kabupaten Sorong menggantikan Bapak Stevanus Malaka. Tetapi di arena pertarungan politik electoral, kontalasi makin berbeda. Dimana masyarakat Sorong disodorkan dua figur potensial yang sama-sama berasal dari kalangan anak adat itu sendiri, masing-masing adalah Dr. Jhoni Kamur dan Zet Kadakolo. Dari realitas tersebut, sangat

terlihat kepentingan politiknya. Kompetisi pun tidak bisa berbeda dengan komitmen adat yakni harus memenangkan oleh Dr. Jhony Kamur dan Suko Harjono (JK-Suka).

Setelah keputusan dewan adat di Maladofok, Pertemuan masyarakat adat di kantor LMA Malamoi untuk menegaskan kembali aspirasi masyarakat adat Moi yakni mendukung calon Bupati Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si, berikut kutipan pernyataan:

“Memang dalam keputusan dewan adat di Maladofok dengan berbagai pertimbangan dari seluruh aspirasi masyarakat adat, menetapkan saya sebagai figur yang siap dan layak menggantikan sosok Bapak Dr. Stevanus Malak sebagai bupati kabupaten sorong dan mempertahankan kepemimpinan anak adat Moi di kabupaten sorong. itu semua semata-mata bukan karena kepentingan saya secara pribadi tetapi ini adalah hasil dan kepentingan masyarakat adat”. (Wawancara Jhony Kamuru, tanggal 12 Maret 2018).

Dalam konteks ini peneliti melihat bahwa, modal sosial (*social capital*) merupakan bagian yang sangat strategis, karena keputusan kolektif yang diambil oleh dewan adat di Maladofok dengan dalil aspirasi masyarakat adat Moi pada Ketaatan atas nilai/norma dan patron adat untuk mencapai tujuan dan visi yang sama

dengan dasar kesepakatan kolektif yakni, yang menjadi bupati Kabupaten Sorong (2017-2022) adalah seorang Jhony Kamur (JK). Kondisi tersebut selaras dengan apa yang di oleh Putnam, (Field, 2011: 51) bahwa ‘modal sosial’ adalah bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan besar bersama.

Menurut Dominggus Demos Osok (ketua dewan adat Moi) beliau menjelaskan sekaligus menegaskan dalam kutipan wawancaranya, yang mengatakan bahwa:

“Memang pilkada kabupaten sorong 2017, adalah pertarungan dua anak adat. Tetapi jauh sebelumnya seluruh masyarakat adat melalui keputusan dewan adat di Maladofok sosok seorang Jhony Kamur sebagai figur yang tepat dan figur tunggal yang ditetapkan oleh dewan adat Moi. Kami hanya bersandar pada aspirasi masyarakat, silahkan siapa saja yang maju tetapi Jhony Kamuru adalah Bupati yang mendapat dukungan adat. Walau ada beberapa oknum yang menyatakan dukungan dengan organisasi adat yang lain tetapi tidak mendapat dukungan yang berarti” (Sumber : Hasil wawancara dengan Dominggus Demos Osok (ketua dewan adat Moi. Tanggal 14 Maret 2018).

Sebelumnya juga Dominggus Demos Osok pernah menegaskan bahwa:

“untuk Pilkada mendatang, orang Moi yang maju hanya ada satu saja yakni Dr. Johnny suara tidak terbagi-bagi. Dengan harapan jika yang maju hanya satu orang Moi, maka dia percaya suara masyarakat Moi bulat. Dominggus berharap, dengan dukungan penuh seluruh masyarakat suku Moi dan seluruh masyarakat kemenangan Dr. Johnny Kamuru (JK) pada Pilkada 2017 mendatang bisa diraih supaya suku Moi bisa memimpin” (hasil wawancara dengan Dominggus Demos Osok, Ketua dewan adat Moi. Tanggal 13 Maret 2018).

Kepentingan elit politik untuk mendapatkan dukungan adat sangat terlihat, hasil pengamatan peneliti, jelas terlihat bahwa kepentingan antara adat dan elit politik. Dari kepentingan elite politik terjadi konflik adat Moi, dan dua adat saling mengklaim dukungan kandidatnya (elite politik) masing-masing. Adat Moi Bersatu mendeklarasikan untuk mendukung Zet Kadakolo-Ibrahim Pokko, ketua Dewan Adat Moi Bersatu Bapak Simon Su, menghimbau agar seluruh warga Moi yang berada di Moi Sigin, Pantura dan Malamas bagian dari pada wilayah Moi bersatu untuk mendukung pasangan Zet Kadakolo dan H. Ibrahim Poko (Zetiba), pasalnya kedua figur yang maju baik Zet Kadakolo dan Jhony

Kamuru adalah anak adat suku Moi. Yang sama-sama memiliki hak untuk maju sebagai pemimpin di Kabupaten Sorong.

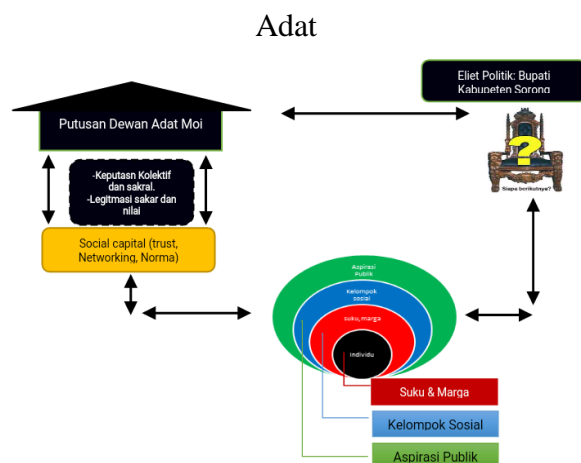
Kutipan Pernyataan Jhony Kamur:

“Sebagai anak adat Moi kita bertindak dan beraktivitas itu harus sesuai dengan nilai adat termasuk dunia politik. saya didukung penuh oleh masyarakat adat karena itu berkat pandangan adat kepada saya selama ini, hal yang wajar masyarakat adat memiliki indikator untuk mendukung seorang anak adat untuk bertarung di pemilihan Bupati. saya kira kita anak adat, penting sekali harus ada dukungan adat baik politik dan aktivitas itu sendiri di atas tanah yang diberikan Tuhan” (Sumber: kutip sambuatan kemenangan Jhony Kamur dan Suko Harjono di Aimas Sorong, pada tanggal 15 Februari 2017).

Kepentingan elit politik (*elite politics*) menghantarkan *trust* politik yang kuat, tak bisa dipungkiri dewan adat adalah orang-orang pilihan yang diamanatkan secara sakral untuk bekerja menentukan keputusan strategis dalam kepentingan adat Moi. Yang bergabung dengan dewan adat Malamoi adalah orang-orang pilihan dari lulusan pendidikan adat kambik. Mereka yang memiliki kemampuan dibidang kepemimpinan, pemahaman eksistensi diri, kemampuan pengobatan tradisional dan radikal budaya serta sejarah masyarakat adat Moi. Tak kalah penting juga bahwa pemimpin adat adalah mereka yang lulus

dari proses pendidikan adat kambik dan menjadi pengambil keputusan dalam proses sidang adat di Maladofok, hal yang sama disampaikan oleh Pak. Ulim (seniman dan budayawan Moi) saat menjadi pemakalah pada seminar kebudayaan di Kabupaten Sorong 2 Mei 2017, mengatakan bahwa dewan adat membuat keputusan melalui majelis Putusan dewan adat yang merupakan putusan final. Sebab dewan adat adalah mereka dari alumni/lulusan pendidikan adat kambik yang fasih dan tuntas bicara masalah tiga hal: kepemimpinan, eksistensi diri, pengobatan serta matang tentang sejarah dan budaya masyarakat suku Moi. saat ini, setiap keputusan politik harus diikuti dan dijalankan, apalagi keputusan itu berhubungan dengan *nasa* (pemimpin).

Bagan: Model Keputusan Politik Dewan



Sumber : Model keputusan politik oleh dewan adat Moi yang diolah penulis

Karena itu keputusan dewan adat (elite adat) merupakan bagian dari rangkaian untuk mencari figur pemimpin yang tepat, dan bertanggungjawab atas masyarakat adat dan masyarakat Kabupaten Sorong yang dipimpinnya. John Field, (2011: 23), Modal hubungan sosial yang jika diperlakukan akan memberikan ‘dukungan-dukungan’ bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang sering kali diperlakukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan bisa menjadi alat tukar misalnya dalam karir politik.

### Modal Figur dan Patronase Adat di Arena Pemilihan Pemimpin Lokal

Dari hasil riset sosial-politik *indeks politik Indonesia (indekspol)*, memberikan suatu kesimpulan bahwa, salah satu indikator bagi elite politik (*elite politics*) untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah membutuhkan legitimasi dari dewan Adat Moi. Legitimasi adat memiliki angka presentase 22 persen (%), sedangkan indikator Kejujuran (*juju*) pada angka 15 Persen (%) dari total responden (N: 400). Dari analisis yang ditemukan dan terlepas dari modal kepercayaan yang berakumulasi menjadi legitimasi dewan adat di Maladofok. Presentasi di atas adalah kejujuran, jujur



menjadi indikator modal sosial yang penting dan diinginkan oleh komunitas masyarakat adat pada umumnya dan masyarakat migran (pendatang) pada khususnya.

Harus diakui bahwa jika elit dikenal sebagai figur baik dan dekat dengan masyarakat, maka dipastikan peluang terpilih sebagai pemimpin sangat mudah. Dengan kultur patronase yang dimainkan oleh seorang elit itu sendiri bisa mendorong kepentingan elit politik memenangkan pemilihan pemimpin daerah, hal ini bisa kita lihat pendapat dari Scott (Guno, 2016: 10), patronase adalah relasi patron-klien antara dua orang yang berbeda status, didalamnya terjadi proses pemberian uang, barang dan jasa. Scott menegaskan bahwa budaya patron-klein itu sendiri sangat menguat di Negara seperti Thailand, malaysia, Filipina dan termasuk Indonesia.

Dari analisis ini, legitimasi adat juga melacak perjalanan hidup atau rekam jejak (*track record*) seorang calon pemimpin. Ternyata dewan adat (elit adat) sebagai pemberi legitimasi dan patron bagi masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Jika kita menyimak hasil penelitian tersebut, maka sepadan dengan dengan pendapat James Smith (dalam

Abdul Halim, 2017: 138), seorang wakil/pemimpin harus sama dengan keinginan yang diwakili. Artinya: wakil/pemimpin adalah miniatur yang diwakili.

Jadi aspirasi masyarakat adat yang ditegaskan dalam sidang dewan adat Moi di Maladofok hanya mendukung Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten Sorong. Serta rekomendasi dari dewan adat yang diberikan kepada Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si yang berpasangan dengan Suka Harjono, S.Sos.,M.Si untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Stepanus Malak sebagai Bupati Kabupaten Sorong pada periode 2017-2022. Seorang anak adat yang mendapat dukungan dan legitimasi dewan adat (elit adat) sebagai seorang pemimpin tentunya melalui telaah dan pengkajian yang matang sesuai dengan mekanisme sidang adat di kampung adat Maladofok.

Selain dewan adat (elit adat) sebagai pemberi legitimasi sakral dalam keputusan politik. Konstruksi koalisi Jhony kamuru (JK) dan Sukoharjo (Suko). Sukoharjo adalah salah satu putra terbaik masyarakat Jawa (migran) yang notabene adalah jumlah penduduk terbesar di kabupaten Sorong. Simpul politik

etnisitas dan kebersamaan budaya menyatukan koalisi suku Moi dan Jawa (MOJA). Dan isu politik tersentral dalam kepentingan antara legitimasi dewan adat dan solidaritas etnis. Temuan (observasi) dalam diskursus politik di Kabupaten Sorong banyak yang menginginkan dan mengharapkan daerah Kabupaten Sorong hanya dibangun dengan dua Koalisi yaitu moja (Moi-Jawa).

Kesadaran politik yang dibangun oleh dewan adat (elit adat) dan elit politik (*elite politics*) dalam arena demokrasi di Kabupaten Sorong. Modal jaringan atau akses yang kuat dalam membangun kepentingan bersama atau kita pinjam istilahnya Fiedl (dalam Fatimah dan Afifuddin, 2013: 7) modal sosial bisa kita ringkas dalam dua hal: soal hubungan dan membangun hubungan dengan sesama.

Lain halnya dengan figur/kandidiat Zet Kadakolo dan H. Ibrahim Poko, koalisi ini adalah koalisi Moi-Bugis. Koalisi ini tidak mendapat restu dari proses dan mekanisme dewan adat (elite adat) di Maladofok. Setelah putusan dewan adat di Maladofok, Berbagai persoalan muncul di komunitas masyarakat adat Moi dan berefek kepada perpecahan dikubu dewan adat (elit adat) Moi.

Setelah Putusan dewan adat melalui sidang adat di Maladofok pada tanggal 18-21 November 2015 Mendukung Bapak. Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si, menjadi Bupati Kabupaten Sorong. Siapa yang tidak kenal Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si. beliau adalah anak adat Moi yang layak dan harus menjadi pemimpin di Kabupaten Sorong. Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si mendapat legitimasi kuat dan keputusan dari dewan adat (elite adat), karena jiwa sosial dan kebijakan strategis yang pro-rakyat semasa dia (Jhony Kamuru) masih menjadi seorang elite birokrasi.

Elit politik (*elite politics*) ini menjadikan ruang adat sebagai legitimasi kuasa politik, untuk mempermudah dan memberikan relasi sosial politik dan meraup dukungan politik. Hasil dari sidang adat yang kemudian berkomitmen merekomendasikan kepada salah satu kandidat calon Bupati (Dr. Jhony Kamuru, SH.,M.Si) dalam pilkada Kabupaten Sorong. Kepercayaan dan legitimasi kekuatan tradisional (adat) menjadi penting dan sangat dibutuhkan dalam kepentingan elit di percaturan politik lokal.

Jika perjalanan para elite politik (*elite politics*) di tanah Papua terutama di Kabupaten Sorong, sudah barang tentu tahu bahwa dewan adat (elit adat) adalah

lembaga pemberi legitimasi sakral yang dijadikan alat untuk mobilisasi. Peneliti menganalisa bahwa adat menjadi modal yang bisa membangun relasi/hubungan, baik itu hubungan sosial, kultur, agama dan politik. Esensi dari kompetisi antarmasyarakat adalah terdorongnya potensi-potensi yang lama terpendam. Terutama di tanah Papua setelah mendapat kebijakan khusus dari Negara Republik Indonesia euphoria dan logika pertarungan di tanah Papua harus Orang Asli Papua (OAP).

Dari aspek norma, jaringan dan kepercayaan, elit politik sangat berkepentingan untuk memenangkan kontestasi politik demokrasi. **Pertama:** Norma, masyarakat adat Moi senantiasa mengikuti keputusan yang diambil oleh dewan adat berdasarkan aspirasi masyarakat adat dari berbagai tingkatan, norma menjadi semacam suatu warisan leluhur yang selama ini terus mengikat dan dijalankan oleh masyarakat adat; **Kedua,** Jaringan/relasi: masyarakat berkomitmen dengan patron adat. Sederhananya adalah himbauan dari ketua dewan adat untuk mengikuti hasil keputusan dewan adat di Maladofok, maka seluruh masyarakat adat dari berbagai marga/klan siap untuk mengikuti perintah tersebut sebagai bentuk dari komitmen terhadap keputusan dewan

adat. Ketiga, *Trust* (Kepercayaan), nilai tertinggi yang dibangun oleh masyarakat adalah sebuah kepercayaan. Baik percaya secara patron adat dan kepercayaan terhadap figur atau calon kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Sorong. Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat dilihat bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 15/02/2017 dimenangkan oleh Jhony Kamur dan Suko Harjono (JK-Suka).

### SIMPULAN

Peran modal sosial (*social capital*), memberkan motif efek yang kuat dalam arena pemilihan pemimpin local di Kab. Sorong. Hal itu bisa kita lihat bahwa pilkada di Kab. Sorong membawa kepentingan masyarakat yang kuat sehingga adat menjadi legitimasi yang kupuk tinggi. Arti lain adat itu sendiri penulis baca dalam kerangka modal sosial, dengan dasar dan alasan norma, kepercayaan dan jaringan yang dijaga selama ini cukup berperana dalam dunia sosial dan politik. Ada sistem nilai yang dibangun oleh masyarakat adat Moi dan mereka memiliki standar dan mekanisme adat melalui majelis dewan adat di Maladofok di Sayosa dan menetapkan dukungan masyarakat adat kepada Jhony Kamuru sebagai calon bupati

tunggal Kab. Sorong. Ada makna kepercayaan yang dititik beratkan kepada sosok adat Moi sendiri tidak boleh dari suku lain yang memimpin tanah adat moi.

Jika kita mencermati perjalanan dan pertarungan diarena pemilihan pemimpin di Kab. Sorong tentu semua orang dan kebanyakan orang berbicara bahwa pengaruh personal figur mejadi salah satu kunci kuat. Sebab sosok figur Jhony Kamur yang menang mengalahkan Zet Kadakolo sudah puluhan tahun berbuat untuk masyarakat sorong. Sisi kepercayaan, jejaring yang dibangun dan menggandengan orang jawa sebagai wakilnya adalah hal yang tepat dalam keputusan politik.

Elit politik saat ini menggunakan modal sosial menjadi satu saluran dan akses politik untuk membangun solidaritas dan menggait dukungan, tetapi kekuatan modal sosial itu sendiri bukan hal yang mudah untuk kita miliki, sebab harus membutuhkan kepercayaan yang dibangun secara berkesinambungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Ubed, 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda-Tanda Identitas*. Magelang: Indonesiatera.
- Alfian, M. Alfian, 2009. *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ardianto, Elivinaro, 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Simbiosis
- Biezeveld, Renske, 2010. *Adat dan politik di Indonesia: Ragam Peran Adat di Sumatra Barat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- Chalik, Abdul, 2017. *Pertaruangan Elit dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga di Terjemahkan oleh Achamd Fawaid*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Field, Jhon, (2011). *Modal Sosial (Terjemahan)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis, 2010. *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (Terjemahan)*, Yogyakarta: Qalam Yogyakarta.
- Halim, Abd, 2014. *Politik Lokal, Pola, Actor & Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube dan Panggung*. Yogyakarta: LP2B.
- Hasbullah, 2004. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Keller, Suzane, 1995. *Penguasa Dan Kelompok Elite Penentu Dalam*

*Masyarakat Modern* (Terjemahan), Jakarta: Rajawali Press.

2017". [www.radarsorong.com](http://www.radarsorong.com) tagal 11 Maret 2016).

Malak, Stepanus dan Likewati, Wa Ode, 2011. *Etnografi Suku Moi (Kabupaten Sorong Papua Barat)*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.

Wijaya, V. I., Amiruddin, A., Sofyan, A., & Basri, L. (2021). MAKNA REVITALISASI BIOROKRASI DAN KOLABORASI BUDAYA LOKAL TERHADAP KINERJA ASN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SORONG. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 33-45.

Malak, Stepanus dan Likewati, Wa Ode, 2011. *Kamus Indonesia Moi*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.

Outhwaite, William, ed, al, 2008. *Kamus Pemikiran Sosial Modern* (edisi 2) (Terjemahan). Jakarta: Kencana

### PROFIL SINGKAT

Lahir 33 tahun yang lalu di Tidore Maluku Utara, jenjang pendidikan S1 di UNG (lulus 2010), S2 UMJ (lulus 2014). Sementara lagi melanjutkan studi di program doctoral Universitas Muhammadiyah Malang. Bekerja sebagai pengajar fakultas ilmu sosial dan politik di UMSorong dan terlibat sebagai penelitian di IndeksPol Indonesia dan LSI (2006-sekrang).

Tjahjoko, Guno Tri, 2016. *Politik Ambivalensi, Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: PolGov.

Tilaar, H.A.R., (2007). *Meningdonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Laporan hasil Survei Sosial Politik indeks politik Indonesia di Kabupaten Sorong Papua Barat 2016.

Dr. Jhony Kamuru, Harga Mati Cabup Kabsor. [www.radarsorong.com](http://www.radarsorong.com) (di Akses Pada Tanggal 9 September 2017).

Berikut pernyataan Tim Moi Bersatu Mendukung Pasangan Zetiba. [www.radarsorong.com](http://www.radarsorong.com) (di aksesn 9 september 2017).

Tanah Moi Harus di Pimpin Orang Moi. <http://lensapapua.com> (di akses 9 september 2017).

Pastor Josep L Sena, tentang “*Saatnya Orang Moi Jadi Pemimpin: Sebuah Provokasi Positif Jelang Pilkada*